

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta.
- Harsono, Boedi. 1995. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djembatan
- Iskandar, Mudakir. 2015. *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum: Upaya Hukum Masyarakat yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak*. Jakarta: Permata Aksara.
- Limbong, Bernard. 2015. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Limbong, Bernhard. 2012. *Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Masruhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka.
- Perangin, Effendi. 1994. *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Parlindungan, A. P. 1998. *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- Santoso, Urip. 2010. *Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Santoso, Urip. 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Sitorus, Oloan dan Limbong, Dayat. 2004. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Kebijakan Tanah Indonesia.
- Sumarjono, Maria S.W. 2007. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Buku Kompas.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*,
(*Staatsblads Tahun 1874 Nomor 23*)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 388-8/2018)

Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/509/KPTS/013/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan JLLB Kota Surabaya.

C. LAIN-LAIN

- Koeswahyono, I. 2008. Melacak dasar konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum, *Jurnal Konstitusi Universitas Brawijaya*, Vol.1(1).
- Lestari, P. 2020. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila. *SIGN Jurnal Hukum*, Vol.1(2), 71-86.
- Rachman, A et.al. 2019. Implementasi Asas Keselarasan Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Sagacious*, Vol 6(1).
- Subekti, R. 2016. Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.5(2), 376-394.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Yusuf, D. dan Akhmaddhian, S. 2019. Asas Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Negara. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol.10(02). 100-105.
- Wawancara dengan Indah Nur Hayati, S.T, M.E. selaku Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pemerintah Kota Surabaya tanggal 2 September 2022 Pukul 14.00 WIB dan tanggal 25 November 2022 Pukul 14.00 WIB
- Wawancara dengan Giri Santoso, S.T. selaku Staff Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pemerintah Kota Surabaya, Hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 Pukul 15.00 WIB
- Wawancara dengan Siti Aisyah, S.T, M.AP selaku Sub Koordinator Pengadaan Tanah Infrastruktur Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pemerintah Kota Surabaya, Hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022 Pukul 13.30 WIB
- Wawancara dengan Musleh, A.Ptnh, M.Si selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan ATR/ BPN Kantor Pertanahan Kota Surabaya I pada Hari Jumat, tanggal 9 September 2022 Pukul 13.00 WIB
- Wawancara dengan Sarul Iswandi, S.H., M.H. selaku Koordinator Substansi Pengadaan, Penilaian, dan Pencadangan Tanah ATR/ BPN Kantor Pertanahan Kota Surabaya I pada Hari Jumat, tanggal 9 September 2022 Pukul 13.30 WIB